BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1). Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terorganisir oleh orang dewasa untuk membantu anak didik mencapai cita-citanya dan mengembangkan potensi jasmani dan rohaninya agar dapat menjadi orang dewasa yang matang dan dapat menangani tanggung jawabnya sendiri (Hidayat & Abdillah, 2019).

Bahkan setelah lulus dari sekolah, akan terus mempelajari hal-hal yang tidak tercakup di dalam kelas karena pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang kuat atau platform bagi masyarakat mana pun untuk dapat memodifikasi sikap atau perilaku melalui praktik dan pembelajaran. Hal ini memiliki arti penting yang lebih besar. Disajikan dalam upaya untuk mencegah masyarakat tidak berpendidikan dan tidak memiliki pendidikan dasar, yang akan mencegahnya mencapai kesempurnaan dalam hidup. Jika seseorang tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam hidup, maka pendidikan tidak memberikan hasil yang positif (Yahya, 2020).

Menurut Yusuf (2018), Setiap manusia harus menerima pendidikan untuk dipersiapkan agar dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan, dalam hal ini, mempersiapkan orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan alam dengan tingkat adaptasi yang wajar.

Pengelolaan yang efektif dan efisien dari semua tuntutan kelembagaan dalam pendidikan disebut sebagai manajemen pendidikan. Kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau proses perencanaan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan disebut sebagai manajemen pendidikan. Proses

menyatukan dua atau lebih individu dalam suatu usaha kerja sama atau bekerja sama untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia material dan manusia dengan cara yang efisien, efektif, dan masuk akal dalam rangka membantu pencapaian tujuan pendidikan dikenal sebagai manajemen pendidikan (Hidayah & Widodo, 2020).

Sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok non-pemerintah, untuk melaksanakan inisiatif Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pembentukan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan penyusunan pedoman teknis, pembuatan Peta Jalan Sekolah Aman 2015-2019, munculnya berbagai inisiatif peningkatan kapasitas guru dan siswa adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan.

Tahapan-tahapan bencana, termasuk pra-bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca-bencana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kabupaten di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), yang menggabungkan, melaksanakan, dan mengembangkan kesepakatan-kesepakatan internasional ke dalam konteks regional. RAN PRB ini ditinjau secara berkala.

Pemerintah di semua tingkatan kini berfokus pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. Hal ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan program masyarakat, pelatihan, penyuluhan, seminar, simulasi, dan penguatan kualitas lembaga pemerintah yang menangani bencana, di antaranya. BNPB, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di Indonesia, terdapat tiga pendekatan utama dalam pendidikan: formal, non-formal, dan informal. Tujuan umum dari berbagai pendekatan pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kecerdasan penduduk. Menerapkan

kesiapsiagaan bencana di sekolah merupakan komponen penting dalam upaya mengurangi bencana sejak dini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri juga memberikan rekomendasi umum untuk mitigasi bencana.

Pendidikan kesiapsiagaan bencana kini menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pendidikan formal berkat kampanye sekolah aman dan surat edaran pemerintah tentang pengarusutamaan risiko bencana di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 31 Maret 2010 (Surat Edaran Nomor 70a/SE/MPN/2010). Menteri Pendidikan Nasional menghimbau para gubernur, walikota, dan bupati di seluruh Indonesia untuk menerapkan manajemen bencana di sekolah dengan melakukan tiga hal: 1) Memperkuat peran kelembagaan dan kapasitas siswa; 2) Memasukkan mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan formal, termasuk ekstrakurikuler dan intrakurikuler; 3) Membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah.

Namun, karena tidak adanya penegasan lanjutan melalui produk kebijakan yang mengikat, himbauan ini tidak diimplementasikan secara serius oleh daerah. Daerah baru akan melaksanakannya jika ada intervensi dari lembaga/instansi eksternal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertugas mengembangkan kecerdasan generasi muda. Keberadaan sekolah siaga bencana ini sangat bermanfaat bagi warga sekolah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kesiapsiagaan sekolah juga dapat meningkatkan rasa aman bagi warga sekolah, terutama siswa, yang merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, karena sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dewasa ini, sering ditemukan bahwa sejumlah besar bangunan dan infrastruktur pendidikan yang dimiliki sekolah dan menerima bantuan dari masyarakat dan pemerintah tidak digunakan secara maksimal dan tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan

tujuan awal pembangunannya. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh manajemen yang tidak memadai dan pengabaian terhadap aset dan infrastruktur yang dimiliki (Iswan, 2018).

Secara geografis, Kabupaten Batang Hari terletak di antara garis lintang 1023' dan 2023' Lintang Selatan dan di antara garis bujur 102029' dan 103028' Bujur Timur. Iklim di wilayah ini beriklim tropis, dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 11 hingga 100 meter di atas permukaan laut (92,67 persen). Sisanya, 7,33 persen, berada di ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sungai Tembesi dan Sungai Batang Hari merupakan dua sungai besar yang mengalir di kabupaten ini. Luas wilayah Kabupaten Batang Hari adalah 5.804,83 ribu kilometer persegi (km²). Akan ada 124 desa dan 8 kecamatan di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2024. (BPS Kabupaten Batang Hari, 2024).

Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 308.753 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km² (Dukcapil Kabupaten Batang Hari, 2023).

Menurut data (BPBD Kabupaten Batang Hari, 2021), komitmen bersama unsur pentaheliks untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Batang Hari, Nomor : 736/416/BPBD/2021 antara lain:

- 1) Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi secara interaktif untuk program kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Akademis, Komunitas, Masyarakat dan Medis.
- 2) Membentuk Komunitas/Kelompok/Unit Cegah Siaga/Aman bencana di setiap wilayah kerja Desa/Kelurahan, Sekolah dan Perusahaan serta Masyarakat.
- 3) Melaksanakan dan mengedepankan kegiatan Pencegahan Bencana yang terintegrasi lintas sektor antara Pemda/Pemdes, Perusahaan dan Sekolah serta masyarakat secara konsisten dan keberlanjutan.
- 4) Merencanakan program kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana kedalam dokumen perencanaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, Perusahaan dan Pendidikan Sekolah.
- 5) Menjalankan Rencana Aksi dalam upaya Mitigasi Bencana berbasis Vegetasi dan Kesiapsiagaan berbasis Masyarakat.

Ada 39 Sekolah yang terdampak bencana Hidrometeorologi pada akhir tahun 2023 untuk fasilitas pendidikan untuk PAUD, TK, SD, MIN, Madrasah, SLTP, MTS, Pesantren, SLTA (Dinas PDK Kabupaten Batang Hari, 2023). Dengan adanya kejadian tersebut dan melihat history maka SMA.S Zuhijjah Muara Bulian membentuk Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) penanggulangan bencana disekolah, karena upaya pencegahan dan pengembangan respon/tanggap darurat sebelum terjadinya bencana ini dianggap perlu untuk melatih kesiapsiagaan peserta didik untuk menjaga lingkungan yang aman serta merencanakan kesinambungan pendidikan baik dimasa tidak ada bencana maupun disaat terjadi bencana. SMA.S Zuhijjah Muara Bulian juga bertekad untuk menjadi salah satu sekolah aman bencana yang ada di Kabupaten Batang Hari. Keamanan dan kesiapan bencana menjadi aspek yang krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua anggota komunitas pendidikan.

Dengan memiliki Satuan Pendidikan Aman Bencana yang efektif dan terintegrasi, satuan pendidikan dapat lebih siap menghadapi bencana, mengurangi dampaknya, dan melindungi semua yang terlibat dalam proses pendidikan hal ini didukung dengan pendapat Ariani (2021) Pendidikan keselamatan, atau mengajarkan siswa tentang keselamatan di sekolah, masih sangat kurang di lembaga pendidikan. Hal ini terutama berlaku untuk siswa yang termasuk dalam kategori yang paling rentan terhadap bencana, yang dapat terjadi kapan saja dan yang dapat diperburuk oleh bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Implementasi pendidikan keamanan di sekolah yang seharusnya menumbuhkan pengetahuan dan sikap pada siswa yang diwujudkan melalui karakter dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana, belum terjadi di satuan pendidikan.

Maka terbentuklah Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang ada di SMA.S Zuhijjah Muara Bulian pada awal tahun 2022. Maka dari itu peneliti tertarik mengadakan penelitian di SMA.S Zuhijjah Muara Bulian dengan judul “Implementasi Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Batang Hari”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Implementasi Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Batang Hari?
- 2) Apa peran Penyelenggara Pendidikan dalam melaksanakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Batang Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Batang Hari.
- 2) Untuk menganalisis apa saja peranan Penyelenggara Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana yang sudah berjalan selama ini yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan.

1.4 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan semula, maka perlu adanya batasan penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini menekankan pada implementasi manajemen sekolah program satuan pendidikan aman bencana di sekolah menengah atas kabupaten batang hari
2. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada SMA.S Zulhijjah kabupaten Batanghari.

Ada keterbatasan penelitian dalam penelitian yang diusulkan ini. Hanya satu sekolah yang dijadikan tempat penelitian di SMA.S Zulhijjah Muara Bulian. Hal ini dikarenakan mudahnya peneliti mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kasus.

Partisipan dalam studi tersebut meliputi Tim Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Siswa yang merasakan dampak dari Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana ini. Pada saat yang sama, informasi yang diperoleh dari peserta lain digunakan sebagai informasi pendukung.

1.5 Asumsi Penelitian

Berdasarkan observasi awal, Pemangku kepentingan dalam Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana memberikan informasi kepada peneliti mengenai kejadian atau rangkaian bencana tertentu yang membahayakan dan mengganggu kehidupan manusia dan faktor alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam rangka mewujudkan pengurangan risiko bencana di sekolah yang diteliti, maka perlu dilakukan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat untuk beberapa pihak antara lain:

1) Secara Akademis

- a) Untuk membuka wawasan keilmuan khususnya dalam menghadapi masalah pelaksanaan Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang ditinjau dari segi implementasi.
- b) Untuk menambah hasil kajian tentang Implementasi Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana dan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2) Secara praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan meningkatkan kesadaran manajemen sekolah tentang bahaya bencana.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang Implementasi Manajemen Sekolah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana.

1.7 Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, **Manajemen** didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara berhasil dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan secara institusional dan nasional. Indikator-indikator kinerja yang berhasil dipenuhi sekolah dapat digunakan untuk melihat hasil pengelolaan. Dalam rangka mengelola sekolah, kepala sekolah harus mampu melaksanakan kewajibannya. Kepala sekolah menunjukkan tanggung jawabnya dalam dua kapasitas utama, yaitu sebagai pemimpin dan atasan. proses pengelolaan sekolah dengan mengorganisir, mengajar, mengawasi, dan merencanakan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan unit-unit pendidikan.

Menurut studi ini, **Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)** menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan bencana sekaligus memberikan perlindungan dan keamanan bagi siswa, pengajar, dan tenaga kependidikan lainnya dari ancaman bencana.

Dalam studi ini, **Pengurangan Risiko Bencana (PRB)** mengacu pada serangkaian metode yang digunakan secara metodis untuk menilai risiko bencana yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Telah banyak keberhasilan dan kemajuan dalam manajemen bencana setelah dilakukan berbagai upaya. Untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan ini tidak hanya mengurangi bahaya yang ada saat ini, tetapi juga menghentikan pembentukan bahaya baru, efektivitas pengurangan risiko bencana (PRB) harus terus dinilai dan dipantau.

Investasi **Pengurangan Risiko Bencana (PRB)** harus selalu terarah dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga manfaatnya langsung terlihat di sekolah. Oleh karena itu, untuk mendukung kemajuan upaya penanggulangan bencana diperlukan keterlibatan yang kuat antara sekolah, lembaga pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya.